



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BURU SELATAN**

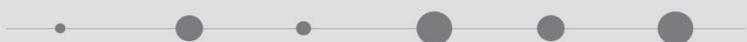
20  
22

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BURU SELATAN**

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KAB. BURU SELATAN**



# Laporan Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan

2022

Nomor Publikasi :

81090.2302

Nomor Katalog :

1202059.8109

Ukuran Buku :

21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman :

viii + 85 Halaman

Naskah :

Nizar Zulmi Abimayu, S.Tr.Stat

Gambar Kulit :

Kukuh Septa Primananda, S.Tr.Stat

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi BPS Kabupaten Buru Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2022 dan menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Kabupaten Buru Selatan.

Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Buru Selatan 2020-2024. Pada level Kabupaten/Kota, dilaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting dan atau keluaran (*output*) lainnya. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa mendatang, sangat kami hargai.

Namrole, 26 Januari 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Buru Selatan



Hertly Diana Soumokil

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunn Organisasi BPS Kabupaten Buru Selatan	3
1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Buru Selatan	5
1.5 Potensi dan Permasalahan	8
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	12
Bab II Perencanaan Kinerja	13
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.2 Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	18
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Analisis Capaian Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan	25
3.2 Prestasi dan Inovasi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	60
3.3 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022	63
Bab IV Penutup	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Rencana Tindak Lanjut	75
Lampiran	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan	7
Tabel 2	Tujuan BPS Kabupaten Buru Selatan 2020 – 2024	15
Tabel 3	Sasaran Strategis BPS Kabupaten Buru Selatan 2020 - 2024	15
Tabel 4	Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	23
Tabel 5	Hasil Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022	30
Tabel 6	Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022	36
Tabel 7	Hasil Capaian Kinerja Tujuan Ketiga BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022	40
Tabel 8	Hasil Capaian Kinerja Tujuan Keempat BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022	42
Tabel 9	Hasil Penilaian (Desk Evaluation) SAKIP BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 dan 2022	43
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Satu Tahun 2020 - 2022	50
Tabel 11	Perbandingan Realisasi kinerja Tujuan Dua Tahun 2020 - 2022	53
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tiga Tahun 2020 - 2022	54
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Empat Tahun 2020 - 2022	55
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2022	57
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra 2024	59
Tabel 16	Daftar Prestasi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	61
Tabel 17	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Pada BPS Kabupaten Buru Selatan 2022	64
Tabel 18	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Program Pada BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	65
Tabel 19	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Tujuan Pada BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	66
Tabel 20	Perbandingan Belanja Jasa dan Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pagu, Realisasi dan Presentase Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2022	x
Gambar 2	Persentase Pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	6
Gambar 3	Persentase Pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan Menurut Jenjang Pendidikan	6
Gambar 4	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	16
Gambar 5	Tangkapan Layar Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022	33
Gambar 6	Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) Badan Pusat Statistik	35
Gambar 7	Keterkaitan IKU dengan Dokumen Perencanaan	45
Gambar 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022	48
Gambar 9	Tampilan Web BNI Direct	62
Gambar 10	Alat Token BNI Direct	63
Gambar 11	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Tujuan/sasaran Tahun 2022	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi BPS Kabupaten Buru Selatan	77
Lampiran 2	Renstra BPS Kabupaten Buru Selatan 2020 – 2024 (Reviu Terakhir 2021)	78
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan 2022	80
Lampiran 4	Pengukuran Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	81
Lampiran 5	Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Buru Selatan	83
Lampiran 6	Dokumentasi Prestasi BPS Kabupaten Buru Selatan	84

<https://burselkab.bps.go.id>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Buru Selatan atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

**“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**

***(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)***

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Adapun Misi BPS adalah:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020–2024, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik);
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya;
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik;
4. Kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

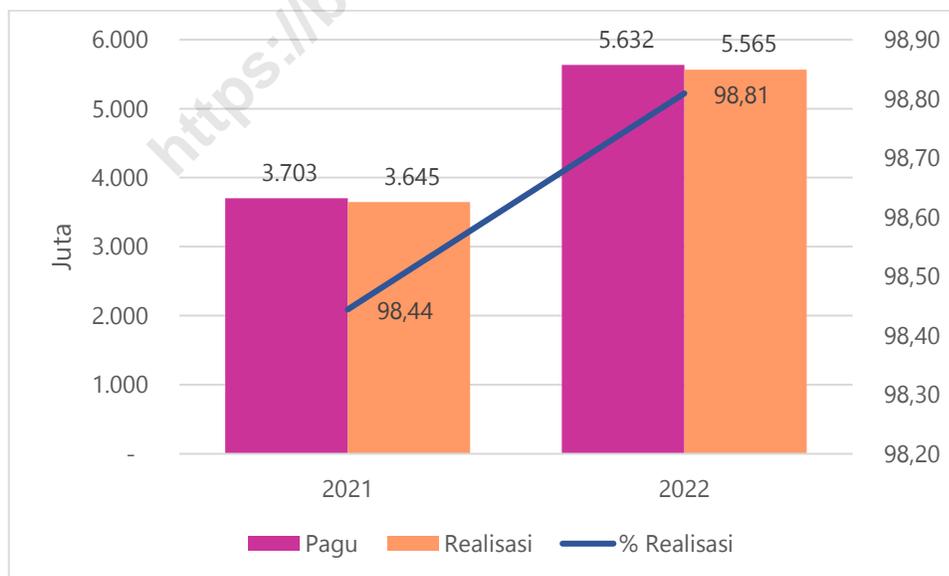
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL);

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dapat dikatakan memuaskan, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja tujuan dari sasaran strategis sebesar 105,48 persen. Pelaksanaan program - program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Anggaran pada awal tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp4.819.536.000 dan telah mengalami 15 (lima belas) kali revisi, terakhir dengan pagu sebesar Rp5.631.584.000 dan realisasi mencapai Rp5.564.515.401 atau sebesar 98,81 persen. Persentase penyerapan anggaran pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2021 yang mencapai 98,44 persen.

**Gambar 1. Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran  
BPS Kabupaten Buru Selatan  
Tahun 2021-2022**



Dalam melaksanakan program - program tersebut, BPS Kabupaten Buru Selatan harus menghadapi tantangan kedepan, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Buru Selatan secara khusus harus

mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat. Tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh BPS Kabupaten Buru Selatan, seperti:

1. Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat, dimana pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*);
2. *Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS;
3. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi;
4. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan dengan keterbatasan SDM yang ada;
5. Tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten karena kekurangtepatan waktu rilis yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah;
6. Penggunaan IT dalam setiap proses bisnis yang ada;
7. Tantangan lain dalam rumpun SDM adalah masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

Berbagai upaya akan dilakukan BPS Kabupaten Buru Selatan untuk dapat mengatasi tantangan kedepan, salah satunya dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha, dan juga pengguna data. Selain itu perlu adanya peningkatan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai.

Harapan terhadap visi BPS sebagai “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”, dicerminkan dari keberhasilan menyediakan data statistik yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten, dan lengkap. Ketersediaan data yang dihasilkan BPS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Secara umum realisasi pencapaian kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian tujuan strategis sebesar 105,48 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan sekaligus telah mampu melaksanakan Misi BPS dengan baik.

<https://burselkab.bps.go.id>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi yang merupakan instansi vertikal.

BPS Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu lembaga perwakilan BPS di daerah dalam hal ini perwakilan di kabupaten/Kota. BPS Kabupaten Buru Selatan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundangan-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPS Kabupaten Buru Selatan menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 (lima) tahun kedepan terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Buru Selatan 2020-2024.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peranan data statistik dalam pembangunan di berbagai bidang, membuat BPS Kabupaten Buru Selatan menjadi sorotan berbagai pihak. Data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Guna menghasilkan kebijakan yang tepat, maka data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan juga harus berkualitas. Oleh karena itu, tuntutan akan kualitas data BPS Kabupaten Buru Selatan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Disisi lain, semakin seringnya survei/pendataan yang dilakukan BPS Kabupaten Buru Selatan membuat responden menjadi jenuh. Kondisi ini membuat tingkat responsibilitas responden terhadap survei/pendataan berkurang. Hal ini mengancam

tingkat kualitas data yang dihasilkan, apalagi terhadap responden yang sama sekali tidak tahu pentingnya data. Peran responden sebagai sumber data sangat penting untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Dari sisi internal, BPS Kabupaten Buru Selatan juga berupaya memperbaiki data statistik yang berkualitas. BPS Kabupaten Buru Selatan juga melakukan penataan SDM serta Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang andal.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kabupaten Buru Selatan Menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggung jawabkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Kabupaten Buru Selatan. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan untuk mencapai kinerja optimal di tahun mendatang.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan, serta sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

### **1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Buru Selatan**

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, BPS Kabupaten Buru Selatan merupakan perwakilan BPS di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

#### **1.3.1. Tugas**

Tugas pokok BPS Kabupaten Buru Selatan adalah melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.3.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPS Kabupaten Buru Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a) Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kabupaten;
- b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kabupaten;
- c) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/Kabupaten;

d) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kabupaten

### 1.3.3. Susunan Organisasi

Guna melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah yang telah diubah ke Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yaitu BPS Kabupaten Buru Selatan sebagai perwakilan BPS Provinsi Maluku di tingkat Kabupaten, berkedudukan di Namrole Kabupaten Buru Selatan. Perubahan peraturan ini berdampak pada berubahnya struktur organisasi BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun secara tugas dan fungsi tidak mengalami perubahan.

Kepala BPS Kabupaten Buru Selatan mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kabupaten serta membina aparatur BPS Kabupaten Buru Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

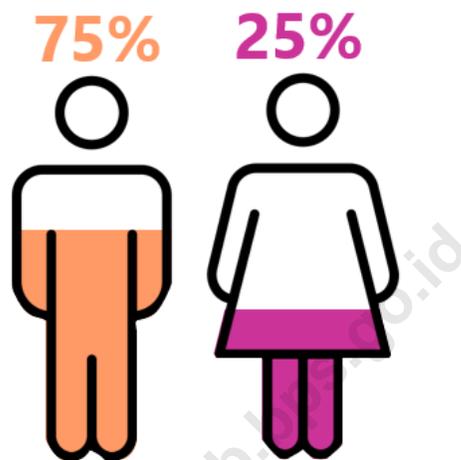
Sejalan dengan perubahan peraturan kepala BPS tentang organisasi dan tata Kelola di BPS Kabupaten/Kota, ditetapkan jabatan fungsional pada lingkup BPS Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Kabupaten/Kota. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Buru Selatan terdapat pada lampiran 1.

#### **1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Buru Selatan**

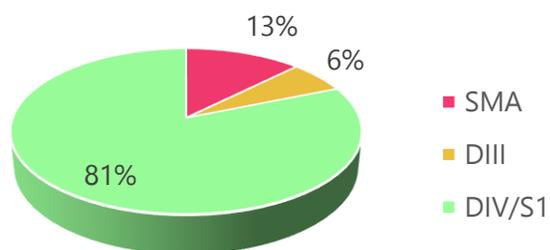
Dalam pelaksanaan tugas penyediaan data sebagai indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. BPS Kabupaten Buru Selatan mempunyai pegawai berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan.

**Gambar 2. Persentase Pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022**



Jenjang pegawai merupakan salah satu indikator untuk penilaian kualitas SDM. Jumlah pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah.

**Gambar 3. Persentase Pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan Menurut Jenjang Pendidikan**



Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa Sebagian besar pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan memiliki jenjang Pendidikan DIV/S1 sebanyak 81 (delapan puluh satu) persen atau sebanyak 13 (tiga belas) pegawai. Sedangkan sisanya, 13 (tiga belas) persen atau 2 (dua) pegawai memiliki jenjang Pendidikan tertinggi SMA dan 6 (enam) persen merupakan lulusan DIII.

Berdasarkan posisi jabatan yang diemban, Jabatan Struktural diisi oleh 1 (satu) Pejabat Administrator (Kepala satuan kerja) dan 1 (satu) Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian Umum). Selain itu, terdapat pejabat fungsional yang terdiri atas pejabat fungsional yang telah secara resmi dilantik dan pejabat fungsional dalam penugasan. Pejabat fungsional yang telah secara resmi dilantik terdiri atas 4 (empat) Statistisi Ahli Muda, 3 (tiga) Statistisi Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Muda, dan 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama. Pejabat fungsional yang diangkat dengan mekanisme penugasan terdiri atas 1 (satu) Statistisi Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata APBN Keuangan Mahir, 1 (satu) Statistisi Pelaksana. Sisanya, sebanyak 2 (dua) pegawai bertugas sebagai Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Komposisi jabatan ini dapat dilihat pada table dibawah.

**Tabel 1.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan**  
**Menurut Jabatan Tahun 2022**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	Administrator	1	6,25
2	Pengawas	1	6,25
3	Statistisi Ahli Muda	4	25
4	Statistisi Ahli Pertama	4	25
5	Statistisi Pelaksana	1	6,25
6	Pranata Komputer Ahli Muda	1	6,25
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	6,25
8	Pranata APBN Keuangan Mahir	1	6,25
9	Koordinator Statistik Kecamatan	2	12,5
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>100</b>

## 1.5. Potensi dan Permasalahan

BPS Kabupaten Buru Selatan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

### 1.5.1. Potensi

Selain memiliki kualitas SDM yang cukup, dalam melaksanakan tugas, BPS Kabupaten Buru Selatan telah memiliki perangkat teknologi yang menunjang tugas dan fungsi. Dengan adanya perpaduan antara SDM dan teknologi diharapkan BPS Kabupaten Buru Selatan dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja satker. BPS Kabupaten Buru Selatan memanfaatkan *google spreadsheet* untuk pembuatan matriks perjalanan dinas, integrasi penomoran Surat Keputusan (SK) Kepala, penyimpanan berbagai link penunjang keberlangsungan satker seperti link pemenuhan kebutuhan dokumen LKE dan ZI, link pemenuhan kebutuhan dokumen SAKIP dan masih banyak lagi. Selain itu, BPS Kabupaten Buru Selatan menggunakan *google docs* untuk pembuatan nota dinas yang terintegrasi antar Subbagian dan Fungsi sehingga penomoran nota dinas tidak menjadi tumpang tindih.

Selain potensi diatas, dengan komposisi pegawai yang didominasi oleh generasi milenial dan Z, maka ide-ide kreatif yang bermunculan semakin banyak di Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada akun jejaring social BPS Kabupaten Buru Selatan yang aktif membagikan kegiatan selama tahun 2022.

Pada tahun 2022, berdasarkan laporan sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) dari Kementerian Keuangan tercatat *penyerapan anggaran* BPS Kabupaten Buru Selatan mencapai 98,81 persen, konsistensi terhadap rencana penarikan awal sebesar 45,56 persen, konsistensi terhadap rencana penarikan dana akhir sebesar 70,32 persen, capaian keluaran kegiatan sebesar 100 persen, dan efisiensi yang dilaksanakan sebesar 4,97 persen. Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak yang harus dibenahi untuk meningkatkan kinerja satker di waktu mendatang.

#### 1.5.2. Permasalahan

BPS Kabupaten Buru Selatan telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2020-2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman).

Secara internal, perlu adanya peningkatan pengawasan baik monitoring dan evaluasi yang lebih intensif sehingga jalannya organisasi dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia yang ada terutama diarahkan untuk memahami konsep dan definisi dari data dan indikator yang dihasilkan. Sehingga, diharapkan semua insan BPS dapat lebih jelas dalam memberikan pemahaman kepada pengguna data terkait data yang dihasilkan oleh BPS. Kekurangan jumlah SDM membuat sering terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang menimbulkan penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu dan penurunan kualitas data yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Kabupaten Buru Selatan, faktor

sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Kabupaten Buru Selatan telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain yakni belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi.

Secara eksternal Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh dengan mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*), dan lebih murah (*cheaper*). Ada juga *responden burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan dan bukan bersifat pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Buru Selatan harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Kabupaten Buru Selatan dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

BPS Kabupaten Buru Selatan dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi di wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat dipenuhi.

<https://burselkab.bps.go.id>

## 1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi dan susunan organisasi BPS Kabupaten Buru Selatan; Sumber Daya Manusia di BPS Kabupaten Buru Selatan, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Buru Selatan; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022; Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 terhadap realisasi kinerja tahun 2021; Capaian Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan terhadap target Renstra 2020-2024; Prestasi tahun 2022; Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022; dan Realisasi Anggaran tahun 2022.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun 2022, BPS Kabupaten Buru Selatan menggunakan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagai rujukan. Renstra yang dimaksud telah memuat visi dan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal mutlak yang harus diterapkan, sehingga pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) menjadi aspek penting yang harus ada dalam setiap pemerintahan.

Transparansi atau keterbukaan informasi khususnya dibidang statistik bagi Badan Pusat Statistik, merupakan sebuah keharusan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penyajian informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya dan lengkap perlu ada dalam setiap tahapan penyajian informasi kepada publik.

Guna mempercepat perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*good government*), BPS Kabupaten Buru Selatan memandang perlu untuk menyusun suatu perencanaan strategis terkait pembangunan dibidang statistik yang komprehensif dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

#### 1. Visi BPS Kabupaten Buru Selatan

Sebagaimana telah diutarakan pada bab sebelumnya, visi BPS Kabupaten Buru Selatan adalah pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Kata "**pelopor**" mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata "**data statistik yang terpercaya**" yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata "**untuk semua**"

dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak.

## **2. Misi BPS Kabupaten Buru Selatan**

Misi BPS Kabupaten Buru Selatan adalah:

- 1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
- 2) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
- 3) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

## **3. Tujuan BPS Kabupaten Buru Selatan**

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi BPS, maka BPS menyusun tujuan dengan indikator yang terukur. Tujuan, indikator beserta target yang akan dicapai dituangkan dalam Rencana Strategis BPS Kabupaten Buru Selatan 2020 - 2024. Tujuan BPS Kabupaten Buru Selatan terangkum dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Tujuan BPS Kabupaten Buru Selatan 2020 – 2024**

No	Tujuan Strategis	Sasaran
(1)	(2)	(3)
1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN
3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

**4. Sasaran dan Indikator kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan**

Untuk mempermudah pencapaian tujuan di atas, maka masing-masing tujuan dibentuk sasaran strategis dengan indikator yang terukur juga. Sasaran strategis dari masing-masing indikator sasaran terangkum dalam Tabel 3 berikut ini.

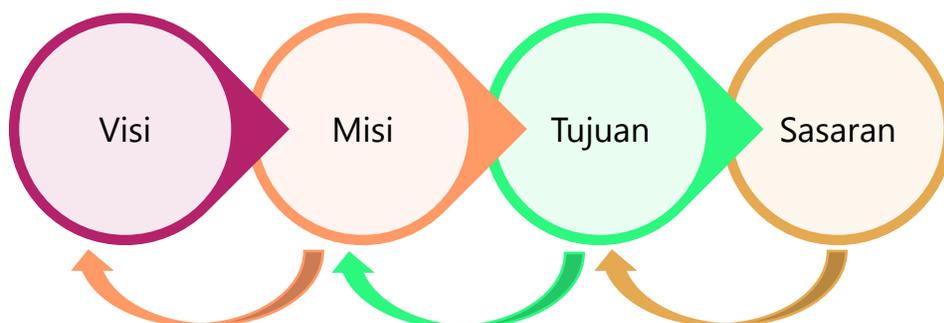
**Tabel 3. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Buru Selatan 2020 – 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkuallitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi

2.	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar
3.	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik
4.	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Sasaran merupakan jembatan untuk mencapai tujuan, sedangkan tujuan merupakan jembatan untuk mewujudkan visi dan misi BPS Kabupaten Buru Selatan. Hubungan antara sasaran, tujuan, misi dan visi dapat dilihat pada gambar 4 berikut.

**Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**



## 5. Kebijakan BPS Kabupaten Buru Selatan

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 - 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 - 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020 - 2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

## 6. Program yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan

Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kabupaten Buru Selatan, maka untuk tahun 2022 dilaksanakan dua program, yang meliputi satu Program Teknis dan satu Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik

yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kabupaten Buru Selatan secara berkesinambungan terus menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan - kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja secara bertahap untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan operasional pengumpulan data. Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi BPS Kabupaten Buru Selatan yang memadai.

## **2.2. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kerjanya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS Kabupaten Buru Selatan

menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (output) dari program BPS Kabupaten Buru Selatan. Pada tahun 2021, dilakukan review terhadap renstra yang telah disusun pada tahun 2020. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

- **Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

**Sasaran 1.1 Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas**

Indikator	Satuan	Target Renstra Sebelum Review				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Nasional	Persen	70	71	72	73	74
		Target Renstra Setelah Review 2021				
		70	89	92	95	98
		70	89	92	95	98
		70	89	92	95	98

Hasil Reviu : Sumber data yang digunakan sebagai dasar perubahan target Renstra pada indikator ini adalah Hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2020. Pada tahun 2020, dari 30 responden yang dicacah, sebanyak 86,67 persen pengguna data adalah dinas/instansi pemerintah yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional, sedangkan penggunaan data lainnya untuk penelitian atau komersil/memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh peneliti/mahasiswa/swasta. Jika dibandingkan dengan hasil tahun 2019, hanya terdapat 70 persen pengguna data yang selaras dengan indikator diatas. Dengan peningkatan yang signifikan ini, dipandang perlu untuk melakukan review atas target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil rapat menyepakati bahwa target tahun 2021 akan dinaikkan sekitar 2-3 persen dari hasil survei tahun sebelumnya.

Indikator	Satuan	Target Renstra Sebelum Review				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100	100	100	100	100
		Target Renstra Setelah Review 2021				
		100	33,33	66,66	100	100

Hasil Reviu : Pada tahun 2020, publikasi statistik yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pada indikator ini hanyalah Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun berjalan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 target ini dapat terpenuhi dengan persentase mencapai 100 persen. Pada tahun 2021 terdapat tambahan publikasi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan target pada indikator ini yaitu Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun berjalan, Statistik Ketenagakerjaan tahun sebelumnya dan Statistik Ketenagakerjaan tahun berjalan. Namun, dengan memerhatikan proses pengolahan data, tabulasi hingga terbitnya publikasi tersebut dan pemanfaatannya, ditetapkan target publikasi yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional sejumlah 1 dari 3 publikasi (33,33 persen) yaitu Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat.

➤ **Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN**

**Sasaran 2.1 Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN**

Indikator	Satuan	Target Renstra Sebelum Review				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	0	0	0	0	0
		Target Renstra Setelah Review 2021				
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Hasil Reviu: Tidak terdapat perubahan target pada indikator ini. Penjelasan tentang penetapan target sebesar 0 persen sesuai dengan Surat Penjelasan Penetapan Target Dalam Rencana Strategis BPS Kabupaten Buru Selatan nomor 25.06/8109/RENSTRA/2020 tanggal 25 Juni 2020.

Indikator	Satuan	Target Renstra Sebelum Review				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.2 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	0	0	0	0	0
		Target Renstra Setelah Review 2021				
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Hasil Reviu : Tidak terdapat perubahan target pada indikator ini. Penjelasan tentang penetapan target sebesar 0 persen sesuai dengan Surat Penjelasan Penetapan Target Dalam Rencana Strategis BPS Kabupaten Buru Selatan nomor 25.06/8109/RENSTRA/2020 tanggal 25 Juni 2020.

➤ **Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

**Sasaran 3.1 : Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I**

Indikator	Satuan	Target Renstra Sebelum Review				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	0	0	0	0	0
		Target Renstra Setelah Review 2021				
		2020	2021	2022	2023	2024
		0	0	0	0	0

Hasil Reviu : Tidak terdapat perubahan target pada indikator ini. Penjelasan tentang penetapan target sebesar 0 persen sesuai dengan Surat Penjelasan Penetapan Target Dalam Rencana Strategis BPS Kabupaten Buru Selatan nomor 25.06/8109/RENSTRA/2020 tanggal 25 Juni 2020.

➤ **Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

**Sasaran 4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan**

Indikator	Satuan	Target Renstra Sebelum Review				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.1.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	57,2	58,1	59,1	59,6	60
		Target Renstra Setelah Review 2021				
		2020	2021	2022	2023	2024
		57,2	57	59,1	60	62

Hasil Reviu : Perubahan dilakukan dalam upaya penyesuaian terhadap hasil penilaian internal oleh Inspektorat atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan yang disusun oleh BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020.

Indikator	Satuan	Target Renstra Sebelum Review				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	98	98	99	99	99
		Target Renstra Setelah Review 2021				
		2020	2021	2022	2023	2024
		98	95	96	97	98

Hasil Reviu : Perubahan dilakukan dalam upaya penyesuaian terhadap hasil SKD Tahun 2020 atas pengukuran kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

### 2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten Buru Selatan telah menetapkan target dari masing - masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun yang dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	92
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	90

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	25
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	90
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan intern (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Buru Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPS. Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kabupaten Buru Selatan adalah menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Buru Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Buru Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun anggaran 2022, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

#### **3.1. Analisis Capaian Kerja BPS Kabupaten Buru Selatan**

##### **3.1.1 Realisasi dan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada Tabel 4.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan,
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN,
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS Kabupaten Buru Selatan telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS Kabupaten Buru Selatan. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020 - 2024, antara lain:

1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
  - 1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
  - 2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator :
  - 1) Meningkatnya komunikasi dengan responden
  - 2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
  - 3) Sosialisasi kepada masyarakat
  - 4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.

- 5) Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM
  - 6) Membuat *Costumer Relationship Management*
  - 7) Menyusun *Data Mining* pengguna data
  - 8) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
  - 9) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
- i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
  - ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
  - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
- d. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas, dengan indikator:
- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
  - ii. Indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
2. Perspektif *Consumer*

SS.1 Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar

pembangunan di Kabupaten Buru Selatan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas di Kabupaten Buru Selatan dengan indikator sasaran:

- a. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

SS.3 Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di Kabupaten Buru Selatan adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I di Kabupaten Buru Selatan dengan indikator sasaran: Persentase OPD di Kabupaten Buru Selatan yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

3. Perspektif *Internal Process*

SS.2 Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuang meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN di Kabupaten Buru Selatan adalah : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN di Kabupaten Buru Selatan dengan indikator sasaran:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh OPD sesuai standar

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4 Sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di Kabupaten Buru Selatan adalah : SDM statistic yang unggul dan

berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan di Kabupaten Buru Selatan dengan indikator sasaran:

- a) Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- b) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten Buru Selatan.

**Tujuan pertama** yaitu "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Buru Selatan". Tujuan peningkatan kualitas data statistik telah tercapai dengan baik. Tujuan ini akan dicapai dengan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas di Kabupaten Buru Selatan" dengan indikator "Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional" dan "Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional".

**Tabel 5. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>					
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	92	92	100
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	90	100	111,11
<b>RATA-RATA</b>					<b>105,55</b>

Indikator pertama dari sasaran strategis untuk tujuan pertama adalah Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Untuk mengukurnya, konsumen diminta menyatakan kepuasan terhadap kualitas data statistik (BPS) yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik. Di setiap ragam data akan ditanyakan 9 (sembilan) pertanyaan meliputi Akurasi/ketepatan data; Kemutakhiran data; Relevansi data; Aksesibilitas data; Komparabilitas data; Koherensi data; Interpretabilitas data; Kelengkapan data; Aktualisasi dan Ketepatan Waktu. Jumlah pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah pengguna data BPS dikalikan dengan 100%.

$$PPMEP = \frac{JPMEP}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

- P PMEP : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- JPMEP : Jumlah pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- JP : Jumlah pengguna data BPS

Adapun fungsi yang menjadi penanggungjawab dari indikator di atas adalah fungsi IPDS. Sumber data untuk indikator ini berasal dari Survei Kebutuhan Data (SKD) yang diselenggarakan secara nasional dengan periode tahunan.

Manfaat pengukuran Indikator ini adalah untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 92 persen, dan realisasinya mencapai 92 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan berjalan dengan baik dan dinilai oleh pengguna bahwa data BPS Kabupaten Buru Selatan dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Buru Selatan.

Sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data, salah satu upaya yang dilakukan BPS Kabupaten Buru Selatan adalah dengan mengawal proses pelaksanaan lapangan melalui mekanisme pengawasan lapangan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pengumpulan data di lapangan.

Selain itu, upaya lain dilakukan pada proses sebelum rilis data publikasi adalah dengan melakukan pemeriksaan kewajaran secara ketat terhadap data hasil tabulasi dan pengolahan. Sehingga, pada proses rilis data, hasil yang ditampilkan dapat mencerminkan keadaan sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator kedua dari sasaran strategis untuk tujuan pertama adalah persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dibagi dengan jumlah publikasi yang dihasilkan dikalikan dengan 100% yang secara matematis adalah sebagai berikut:

$$PPbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$$

Keterangan

- PPbAS : Persentase publikasi Statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
- JPbAS : Jumlah Publikasi Statistik yang bersumber dari Aktivitas statistik menerapkan standar akurasi
- JPb : Jumlah Publikasi yang dihasilkan

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah fungsi Statistik Distribusi, fungsi Statistik Sosial, fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan fungsi Statistik Produksi. Sumber Data untuk indikator ini adalah Data Internal IPDS BPS Kabupaten Buru Selatan dikumpulkan secara nasional dengan periode tahunan. Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 90 persen dan berhasil terealisasi sebesar 100 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya menjadi 111,11 persen. Publikasi yang diterbitkan BPS Kabupaten Buru Selatan yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi

pembangunan nasional adalah “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan 2022”

**Gambar 5. Tangkapan Layar Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022**



Manfaat pengukuran IKU tersebut adalah Untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik. Dari kedua indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis yang pertama dalam tujuan ke-1, terlihat bahwa realisasi seluruh indikator telah mencapai dengan baik dengan nilai capaian kinerja mencapai 105,55 persen.

#### **Masalah/kendala yang dihadapi**

Secara umum, rata-rata capaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas telah mencapai 105,55 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai bahkan ada yang melebihi target. Namun demikian tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan capaiannya di tahun-tahun depannya. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Buru Selatan terkait hal tersebut dikarenakan:

1. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan pada kurun waktu yang bersamaan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tidak maksimal dari sisi supply pegawai yang terlibat.
2. Adanya kejenuhan dari sampel terpilih dalam memberikan respon sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang berbeda dengan sampel yang sama secara berulang.
3. Terdapat banyak mitra yang baru bertugas di tahun 2022 dengan pengalaman survey yang minim dan pemahaman konsep definisi survei yang rendah. Dampak yang timbulkan adalah proses pengumpulan data yang tidak semulus jika dibandingkan dengan mitra yang lama dan lebih memahami konsep definisi survei.
4. Butir-butir pertanyaan dalam survey yang cenderung banyak sehingga waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan survei pada satu sampel memakan waktu yang lama.
5. Kurangnya koordinasi antar fungsi-fungsi yang terkait berdampak pada keabsahan data publikasi yang diragukan untuk mendukung indikator kedua.

#### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

Upaya peningkatan pemanfaatan data statistik yang berkualitas terus dilakukan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan. Sebagai pedoman, BPS Kabupaten Buru Selatan mengikuti yang dilakukan oleh BPS RI yaitu dengan melalui pelaksanaan tahapan penyelenggaraan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) BPS dapat dilihat pada Gambar 6.

**Gambar 6.**  
**Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) Badan Pusat Statistik**



GSBPM BPS membantu mendalami seluk beluk proses dibalik terbentuknya statistik, melihat bagaimana statistik direncanakan, dikumpulkan, dikelola, dan disebarluaskan, serta mengerti standar proses bisnis yang harus dilaksanakan BPS Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Selain itu, secara teknis BPS Kabupaten Buru Selatan juga melakukan berbagai upaya mengatasi kendala tersebut, di antaranya:

- 1) Perlu adanya Monitoring dan Evaluasi secara berkala pada kegiatan yang sedang dan akan berjalan.
- 2) Koordinasi aktif perlu dilakukan antara *Subject Matter* kabupaten dan secara bertahap antara *Subject Matter* Kabupaten->Provinsi->Pusat terkait jadwal kegiatan.
- 3) Mitra baru yang direkrut dan diikuti pada kegiatan BPS perlu mendapat perhatian lebih terkait pemahaman konsep definisi dan teknik pelaksanaan lapangan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *role playing* khusus untuk mitra baru dan pendampingan intensif di lapangan pada proses pemutakhiran dan pencacahan secara sampel.

- 4) Diperlukan proses identifikasi waktu, wilayah dan responden pada survei-survei yang dilaksanakan BPS Kabupaten Buru Selatan guna melakukan mitigasi untuk kegiatan dan petugas yang berurusan.
- 5) Pemeriksaan terhadap proses bisnis penerbitan publikasi dilakukan berlapis dari pengumpul data, pemeriksa, dan pengolah data sehingga kualitas data yang dipublikasikan dapat terjaga.

**Tujuan kedua** yaitu "Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN". Tujuan ini akan dicapai dengan mewujudkan sasaran strategis "Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN" dengan indikator "Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik" dan "Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar".

**Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	25	25	100
	2.1.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50	50	100
<b>RATA-RATA</b>					<b>100</b>

Indikator pertama dari sasaran strategis untuk tujuan kedua adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. Penanggungjawab dari indikator ini adalah

Fungsi IPDS. Pada tahun 2022, target persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sebanyak 25 persen. Perhitungan ini didasarkan atas rumus dibawah ini:

$$RKS = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

- RKS : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- x : Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- y : Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan

OPD yang menjadi target pembinaan adalah diprioritaskan OPD yang melakukan kegiatan statistik (khususnya survei). Dalam penetapan perjanjian kinerja pada awal tahun 2022 antara Kepala BPS Kabupaten Buru Selatan dan Kepala BPS Provinsi Maluku, dipilih 4 (empat) OPD yang akan menjadi target pembinaan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru Selatan, Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan. Dari hasil pembinaan ini, terdapat 1 (satu) OPD yang berhasil mendapatkan rekomendasi statistik yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dimana survei yang akan dilaksanakan adalah survei harga konsumen sebagai dasar perhitungan inflasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa realisasi kinerja untuk indikator pertama sasaran strategis dari tujuan kedua telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.

Indikator kedua pada sasaran strategis dari tujuan kedua adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Penanggung jawab dari indikator ini adalah Fungsi

IPDS. Perhitungan untuk indikator kedua dapat dijelaskan dengan rumus dibawah ini.

$$MDS = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

- MDS : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar
- x : Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar
- y : Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kegiatan statistik

Pada penetapan target diawal tahun 2022, diharapkan 3 (tiga) dari 6 (enam) atau 50 (lima puluh) persen OPD yang melakukan kegiatan statistik dapat menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Keenam OPD yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buru Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru Selatan, dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru Selatan. Diakhir tahun berjalan, dapat diketahui bahwa tiga OPD yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru Selatan telah menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini dapat mencapai 100 persen.

### **Masalah/Kendala yang dihadapi**

Secara umum, realisasi kinerja pada tujuan dua telah mencapai 100 persen. Artinya, seluruh target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022, dapat direalisasikan selama tahun berjalan. Namun demikian, pencapaian ini tidak lantas mencerminkan proses pencapaian target yang mulus. Tentunya

terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi dan solusi atas kendala tersebut agar dapat meningkatkan pencapaian ini dimasa depan.

Dalam pencapaian implementasi SSN, diperlukan kolaborasi yang aktif antara BPS selaku Pembina data dengan K/L/D/I selaku produsen data sektoral. Pada tingkat kabupaten, kolaborasi ini dibutuhkan antara BPS Kabupaten Buru Selatan dengan seluruh Operasional Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan statistik. Dalam kaitannya dengan perumusan rekomendasi statistik bagi OPD dan penyampaian metadata sektoral, terdapat kendala-kendala berikut yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Buru Selatan, diantaranya:

1. Belum tersedianya sumber daya yang khusus menangani pengelolaan data pada tiap OPD
2. Jadwal pengumpulan metadata yang tidak ditepati oleh OPD yang dikunjungi
3. Belum adanya kesadaran tentang pentingnya data sektoral, sehingga asumsi "BPS sebagai pusat segala data" masih melekat ketika ada data yang harus dikumpulkan oleh OPD.
4. Tidak terdapat kecocokan jadwal antara BPS selaku Pembina data sektoral dan OPD selaku instansi yang dibina dalam proses pembinaan statistik sektoral, sehingga proses pembinaan baru dapat dilakukan diakhir tahun.

### **Strategi untuk menghadapi masalah/kendala**

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah diatas, dapat dilakukan solusi-solusi berikut.

1. Setiap OPD agar menempatkan sumber daya dengan latar belakang Pendidikan statistik yang khusus mengelola data terkait

2. Optimalisasi WAG sebagai sarana pengingat bagi OPD yang akan mengumpulkan metadata, sehingga keterlambatan jadwal dapat dihindari
3. Perlunya pembinaan statistik sektoral secara intensif oleh BPS kepada setiap OPD secara bergiliran untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memproduksi data sendiri untuk kegunaan bersama.
4. Penetapan jadwal agar segera dikompromikan dengan OPD yang menjadi target sehingga proses pembinaan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

**Tujuan ketiga** yaitu "Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN". Tujuan ini akan dicapai dengan mewujudkan sasaran strategis "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I" yang diukur dengan indikator "Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik".

**Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Ketiga BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100	400	400
<b>RATA-RATA</b>					<b>400</b>

Pada tujuan ketiga, hanya terdapat satu indikator yang harus dicapai yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik. Penanggungjawab pada indikator ini adalah Fungsi IPDS. Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 adalah sebanyak

1 dari 1 OPD dalam hal ini Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Buru Selatan. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat 3 (tiga) OPD lain yang turut diundang untuk dilakukan pembinaan statistik sektoral yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan, Bagian Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buru Selatan. Sehingga, target yang awalnya telah terealisasi sebesar 100 persen, meningkat menjadi empat kali lipat atau 400%. Peningkatan ini diharapkan menjadi pijakan awal tentang tingginya minat Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan akan membenahan data statistik dan produksi data mandiri.

#### **Masalah/Kendala yang dihadapi**

Realisasi capaian kinerja yang mencapai 120 persen dan jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan, tidak terlepas dari kendala-kendala yang melingkupinya. Kendala-kendala tersebut diharapkan dapat menjadi mitigasi atas pencapaian kinerja dimasa mendatang, diantaranya:

1. Tidak adanya kecocokan jadwal antara BPS Kabupaten Buru Selatan dan setiap OPD yang menjadi target pembinaan untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.
2. Masih adanya pemahaman salah bahwa setelah BPS melakukan pembinaan, BPSlah yang akan melaksanakan survei tersebut dengan dukungan dari pemerintah daerah

#### **Strategi untuk menghadapi masalah/kendala**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikan kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi WAG dalam upaya koordinasi antar OPD terkait jadwal pelaksanaan pembinaan statistik sektoral

2. Penjelasan secara mendalam tentang fungsi BPS selaku Pembina Data kepada setiap OPD agar tercipta pemahaman bahwa setiap OPD secara mandiri mampu untuk memproduksi data demi kemaslahatan bersama, dengan pendampingan dari BPS.

**Tujuan keempat** yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”. Tujuan ini akan dicapai dengan mewujudkan sasaran strategis “SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” yang diukur dengan indikator “Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat” dan “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS”.

**Tabel 8. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Keempat BPS Kab Buru Selatan Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>					
SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	65	67.19	103,37
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100	100	100
<b>RATA-RATA</b>					<b>101,68</b>

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa capaian indikator pertama untuk tujuan keempat yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat sebesar 103,37 % dengan target nilai SAKIP sebesar 65 poin dan realisasi pencapaian nilai SAKIP sebesar

67,19 poin. Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dilakukan meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja mempunyai bobot (20) dan berdasarkan surat inspektur wilayah III nomor R-2027/08300/PW.120/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Desk Evaluation atas Implementasi SAKIP Tahun 2022, BPS Kabupaten Buru Selatan mendapat nilai 67,19 poin dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

**Tabel 9. Hasil Penilaian (Desk Evaluation) SAKIP BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 dan 2022**

No	Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	22,03	23,69
2	Pengukuran Kinerja	25	16,88	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15	6,72	11,17
4	Evaluasi Kinerja	10	4,67	5,25
5	Capaian Kinerja	20	10,00	8,33
	<b>Total Nilai</b>	<b>100</b>	<b>60,29</b>	<b>67,19</b>

Penguatan Akuntabilitas Kinerja di BPS Kabupaten Buru Selatan pertama-tama dilakukan dengan membentuk Tim Kerja SAKIP dan menetapkan tata laksana pemantauan akuntabilitas kinerja dalam bentuk pengelolaan SAKIP organisasi dan pengelolaan SAKIP unit kerja. Tim Kerja SAKIP ini terdiri dari unsur pimpinan, dan perwakilan pengelola SAKIP di masing-masing unit kerja (masing-masing subbagian dan fungsi). Tim Kerja SAKIP kemudian melakukan

rapat setiap triwulan bersamaan dengan rapat struktural untuk melaporkan capaian kinerja yang didapatkan dalam setiap triwulannya. Capaian kinerja ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan yang bersangkutan dan target total selama tahun berjalan. Dari laporan capaian kinerja ini, Tim Kerja SAKIP mendiskusikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan masing-masing indikator, sekaligus mendiskusikan solusi yang sudah diambil, maupun solusi yang masih belum ditemukan. Perubahan target kinerja dilaporkan dalam Rapat Tim Kerja SAKIP ini dan didokumentasikan dalam notulen rapat pembahasan Capaian Kinerja Triwulanan, sehingga kondisi pengelolaan kinerja selalu mencerminkan kondisi yang terjadi per triwulan yang bersangkutan.

Selanjutnya Form Capaian Kinerja atau Form rencana Aksi (FRA) tersebut dilaporkan tepat waktu secara rutin dan periodik melalui:

1. Aplikasi Simonev (<https://monev.bps.go.id/>) dengan periode triwulanan,
2. Aplikasi SMART Kemenkeu berupa data capaian keluaran (<http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/>) dengan periode bulanan,
3. Aplikasi *e-monev* Bappenas pada menu *Output* (<https://e-monev.bappenas.go.id/>) dengan periode bulanan, dan
4. Laman Kemenpan RB yaitu <https://esr.menpan.go.id> dengan periode triwulanan.

*Update* atau *entry* data capaian kinerja/FRA dilakukan setiap bulan untuk menjaga kualitas isian form dan dilakukan evaluasi melalui rapat pembahasan di setiap triwulan. Semakin minim revisi, baik revisi atas target ataupun realisasi, maka kualitas isian form menjadi semakin terjamin.

Unsur penting dalam penyelenggaraan SAKIP adalah disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan



yang telah ditetapkan. Penetapan IKU BPS Kabupaten Buru Selatan telah dilakukan dengan mempertimbangkan elemen SMART, yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bond/Frame*.

Indikator kedua dari sasaran strategis untuk tujuan keempat adalah Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Target indikator ini adalah 100 persen. Manfaat mengukur indikator ini adalah untuk mengukur kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna data. Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator ini adalah Subbagian Umum dan IPDS. Pelaksanaan pengumpulan datanya dilakukan secara nasional dengan periode tahunan. Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen, dan realisasinya mencapai 100 persen. Dengan demikian tingkat capaian kerjanya adalah 100 persen.

Target Indikator Kinerja Tujuan 4 ini ditetapkan dengan alasan :

- a. Kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna data sesuai dengan tujuan organisasi secara umum, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, menggambarkan hubungan kausalitas, menggambarkan *core bussiness*, serta relevan dengan IKU yang terbaru dan telah diformalkan sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2020-2024, dan dapat dirumuskan ukuran keberhasilannya, dapat ditetapkan target pencapaiannya berdasarkan dokumen sumber, sehingga dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala dan kontinyu.
- b. Penetapan nilai target Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS tahun 2022 berdasar hasil SKD tahun 2021.

Strategi kebijakan:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai:
  - o Meningkatkan fasilitas fisik kantor
  - o Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
- b. Peningkatan infrastruktur pelayanan public

### **Masalah/kendala yang dihadapi**

1. Kurangnya perencanaan, pelaksanaan atau pengukuran, pengawasan, pelaporan serta bukti dukung pada SAKIP BPS Kabupaten Buru Selatan
2. Pemahaman yang berbeda antar pegawai BPS Kabupaten Selatan, juga Inspektorat BPS RI selaku Pembina SAKIP. Hal ini berdampak pada implementasi yang diterapkan dan yang diinginkan Inspektorat tidak sejalan.
3. Anggaran untuk peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik terbatas.
4. Minimnya SDM di Subbagian Umum sebagai penanggungjawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik

### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

1. Diperlukan kerjasama yang solid dan tanggungjawab oleh tiap pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan dalam menyelesaikan SAKIP, mengingat pembuatan SAKIP tidak hanya dikerjakan oleh satu orang saja.
2. Perlu adanya kesepahaman antar pegawai dengan Inspektorat dalam bentuk bimbingan atau pelatihan pembuatan SAKIP.
3. Bagian Monitoring dan Evaluasi BPS RI perlu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan SAKIP sehingga dokumen yang dibuat dapat sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh Inspektorat.
4. Melakukan pemeliharaan rutin dan kontinyu atas sarana dan prasarana pelayanan publik.

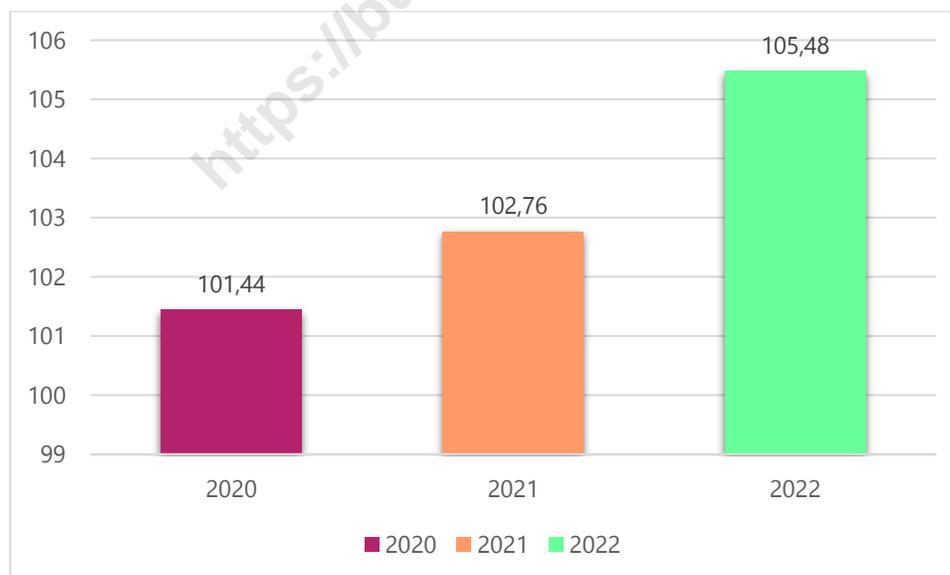
### Rencana Aksi

1. Optimalisasi anggaran yang berfokus pada pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. Pembinaan Penyusunan SAKIP secara langsung dengan Narasumber yang berasal dari Inspektorat BPS RI
3. Mengajukan permohonan penambahan SDM khususnya di Subbagian Umum sebagai Penanggungjawab indikator ini

### 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022

Pada subbagian ini, akan dijelaskan tentang perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Kemudian, akan dijelaskan setiap peningkatan dan/atau penurunan serta kesimpulan dari angka-angka tersebut.

**Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022**



Pada gambar 8 diatas, dapat kita lihat perbandingan capaian kinerja total antara tahun 2020 sampai dengan 2020. Perbandingan yang semula akan dilakukan dari tahun 2018, tidak terealisasi akibat tidak adanya histori capaian kinerja total untuk tahun 2018 dan 2019. Adanya perubahan komposisi tim

penyusun Laporan Kinerja menyebabkan histori data capaian kinerja yang lama tidak tersampaikan kepada tim penulis yang baru.

Terlihat pada gambar diatas bahwa terjadi peningkatan nilai capaian kinerja dari tahun 2020 – 2022. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan pada setiap tujuan, sasaran dan target yang ditetapkan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021 nilai capaian kinerja total sebesar 102,76 persen meningkat menjadi 105,48 persen. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan peningkatan realisasi untuk tiap indikator pada sasaran dan tujuan yang bersesuaian. Peningkatan paling besar terdapat pada tujuan ketiga, sasaran pertama dan indikator pertamanya dengan nilai capaian kinerja mencapai 120 persen.

Peningkatan ini juga didukung oleh adanya perubahan penetapan perjanjian kinerja ditahun 2022, dimana Tujuan 2 dan Tujuan 3 yang sebelumnya belum diterapkan di level Kabupaten, menjadi terimplementasi. Hal ini kemudian mendorong setiap satuan kerja pada level kabupaten khususnya BPS Kabupaten Buru Selatan untuk dapat mencapai target pada tujuan 2 dan tujuan 3 ditahun 2022 ini.

### **3.1.3 Realisasi Kinerja Menurut Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2022**

Pada subbab ini akan dijelaskan perbandingan realisasi kinerja menurut indikator kinerja utama untuk tahun 2020 – 2022 pada BPS Kabupaten Buru Selatan.

a. **Tujuan 1 Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

**Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Satu Tahun 2020 - 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)				(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1 Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	70	76	108,57	89	88,99	99,99	92	92	100
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	33,33	33,33	100	33,33	33,33	100	90	100	111,11
<b>Rata-rata</b>					<b>104,29</b>			<b>99,99</b>			<b>105,55</b>

Pada tabel 10 diatas, dapat kita lihat perbandingan realisasi kinerja untuk tujuan 1 antara tahun 2020 – 2022. Setiap tahunnya, target dan realisasi untuk indikator satu mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2021, realisasi kinerja yang dicapai berada sedikit dibawah target yang ditetapkan. Namun, secara umum dapat diketahui bahwa indikator Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan mengalami kecenderungan untuk naik. Peningkatan yang konsisten nilai realisasi yang konsisten setiap tahun dipengaruhi oleh hasil identifikasi kendala

pada periode sebelumnya yang dijadikan mitigasi untuk tahun berikutnya, seperti :

- 1) Supply pegawai yang tidak cukup memadai ketika terdapat beberapa kegiatan yang berjalan pada periode yang bersamaan.

Solusi: Membuat matriks kegiatan beserta petugas, dalam hal ini pegawai yang terlibat. Jika terdapat kegiatan yang beririsan dalam periode yang bersamaan, menggunakan alternatif mitra sebagai solusinya.

- 2) Adanya kejenuhan dari sampel terpilih untuk diwawancarai Kembali

Solusi: Melakukan identifikasi awal terhadap blok sensus yang beririsan untuk kegiatan yang berbeda untuk dilakukan pengecekan terhadap sampel yang akan diwawancarai. Sampel yang terpilih bukan merupakan sampel final sehingga jika terdapat sampel yang sama untuk kegiatan yang berbeda, dapat dilakukan penggantian sampel.

Apabila sampel yang sama dicacah dalam rentang waktu yang berbeda, sampel tersebut agar diberitahu lebih awal bahwa akan dilakukan pencatatan berulang pada periode berikutnya missal triwulan atau subround berikutnya, sehingga tidak ada kecenderungan untuk jenuh ketika didatangi.

Selanjutnya, pada indikator kedua, dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan antara target, realisasi dan capaian pada tahun 2020 dan 2021. Kesamaan ini didasarkan pada sumber data yang digunakan sebagai dasar penetapan target yaitu SKD. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2022, dimana terdapat peningkatan pada target, realisasi dan capaian kinerjanya. Perubahan yang signifikan pada tahun 2022 didasarkan pada

penetapan target PK 2022 yang telah diatur seragam untuk seluruh Indonesia dengan tetap memerhatikan realisasi terakhir pada tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu berbeda dengan pola penetapan target pada tahun 2020 dan 2021 yang didasarkan pada dokumen Renstra.

Terjadi peningkatan terhadap indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Peningkatan ini didasarkan pada jumlah publikasi yang dijadikan sebagai target berubah dari tahun sebelumnya. Selain itu, nilai realisasi yang lebih tinggi dibanding target mencerminkan perbaikan kualitas monitoring pada indikator ini, dimana sebelumnya terdapat kendala-kendala yang dapat dicarikan solusi pemecahannya, seperti:

- 1) Terdapat data publikasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Solusi : Melakukan pengawasan ketat dalam proses pelaksanaan lapangan oleh pegawai kepada petugas lapangan.

- 2) Terdapat hasil rilis publikasi yang tertukar halamannya dengan publikasi lain

Solusi : Melakukan pemeriksaan silang dan bertahap untuk setiap publikasi yang siap rilis agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

**b. Tujuan 2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN**

**Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Dua Tahun 2020 - 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)				(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	2.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	25	25	100
	2.1.2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	50	50	100
<b>Rata-rata</b>					<b>n.a</b>			<b>n.a</b>			<b>100</b>

Pada tabel 11, dapat dilihat tujuan 2 tidak dilakukan penetapan target dan realisasi untuk tahun 2020 dan 2021. Penetapan target baru dilakukan pada tahun 2022 melalui penetapan perjanjian kinerja yang dilakukan antara kepala BPS Provinsi Maluku dan Kepala BPS Kabupaten Buru Selatan. Besaran target yang ditetapkan didasarkan pada angka yang diberikan oleh BPS RI kepada setiap BPS Kabupaten/Kota. Dalam realisasinya, BPS Kabupaten Buru Selatan berhasil mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100 persen. Pencapaian target untuk tujuan yang baru diimplementasikan di level kabupaten ini tidak mudah. Terdapat sebagian kendala yang ditemui, namun disaat yang bersamaan juga muncul solusi atas kendala tersebut seperti:

- 1) Jadwal pengumpulan metadata yang tidak ditepati  
Solusi : Optimalisasi notifikasi dan pengingat melalui WAG kepada OPD pemberi metadata.
- 2) Tidak terdapat kecocokan jadwal antara BPS Kabupaten Buru Selatan dengan OPD yang akan dilakukan pembinaan statistik sectoral  
Solusi: Pemberitahuan lebih dini kepada OPD yang dijadikan target sejak ditetapkan PK, kemudian mengingatkan secara berkala menjelang kegiatan berlangsung

**c. Tujuan 3 Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tiga Tahun 2020 - 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)				(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100	400	120
<b>Rata-rata</b>					<b>n.a</b>			<b>n.a</b>			<b>120</b>

Pada tabel 12, diketahui bahwa tidak terdapat target untuk tujuan tiga pada tahun 2020 dan 2021. Penjelasan untuk kondisi sama dengan tujuan dua poin b sebelumnya, dimana Penetapan target baru dilakukan pada tahun 2022 melalui penetapan perjanjian kinerja yang dilakukan antara kepala BPS Provinsi Maluku dan Kepala BPS Kabupaten Buru Selatan. Besaran target yang ditetapkan didasarkan pada angka yang

diberikan oleh BPS RI kepada setiap BPS Kabupaten/Kota. Realisasi yang jauh lebih besar dibanding dengan angka targetnya disebabkan adanya tambahan jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dari yang sebelumnya tidak termasuk kedalam target. Semula, target pembinaan statistik sektoral hanya dilakukan untuk 1 OPD, namun pada realisasinya bertambah menjadi 4 OPD, sehingga capaian kerjanya dapat mencapai 120 persen.

Dalam proses pencapaian target pada tujuan ini, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi seperti, Masih terdapat miskonsepsi tentang pembinaan yang dilakukan oleh BPS, dimana setelah BPS melakukan pembinaan, BPSlah yang akan melaksanakan survei tersebut dengan dukungan dari pemerintah daerah.

Solusi : Penjelasan komprehensif tentang fungsi BPS selaku Pembina Data dan OPD selaku produsen data sektoral, agar tercipta pemahaman bahwa setiap OPD secara mandiri mampu untuk memproduksi data demi kemaslahatan bersama, dengan pendampingan dari BPS.

**d. Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

**Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Empat Tahun 2020 - 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)				(4)	(5)	(6)
SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Persen	57,17	55,56	97,18	57	60,29	105,77	65	67,19	103,37
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana	Persen	100	100	100	95	100	105,26	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)				(4)	(5)	(6)
	dan prasarana pelayanan BPS										
<b>Rata-rata</b>					<b>98,59</b>			<b>105,52</b>			<b>101,68</b>

Secara umum, pada tujuan keempat terjadi peningkatan untuk setiap indikator. Khusus pada nilai SAKIP, terjadi peningkatan signifikan selama dua tahun terakhir. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan yang baik pada implementasi Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan. Untuk indikator kedua, peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 disebabkan karena target yang ditetapkan pada tahun 2021 lebih kecil. Hal ini menjadikan realisasi yang konstan setiap tahun dianggap naik pada tahun 2021. Kondisi ini kemudian kembali normal pada tahun 2022 dimana target yang ditetapkan telah disesuaikan kembali.

Nilai SAKIP yang sempat turun pada tahun 2020 disebabkan oleh kendala-kendala berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dokumen SAKIP terkonsentrasi pada satu orang saja  
Solusi: Sejak 2021, pemenuhan dokumen SAKIP dilakukan oleh Tim SAKIP yang anggotanya dipilih sejak awal tahun untuk dapat mengakomodir seluruh dokumen yang diminta
- 2) Terdapat perbedaan konsep antara Tim SAKIP kabupaten dengan Pembina SAKIP pada level BPS RI terkait pemenuhan dokumen

- 3) Solusi: Konsultasi intensif antara Tim SAKIP Kabupaten dan Pembina SAKIP BPS RI agar terdapat kesepahaman konsep terkait dokumen yang diminta.

### 3.1.4. Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Renstra

Pada subbab ini, akan dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja terhadap target renstra tahun 2022. Subbab ini juga akan penyebab realisasi yang lebih tinggi/rendah dibandingkan dengan target renstra yang ditetapkan.

**Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2022	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>					
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	92	92	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	66,66	100	120
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	n.a	25	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	n.a	50	120
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	n.a	400	120
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>					
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	59,1	67,19	113,69

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2022	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	96	100	104,17

Pada tabel diatas, dapat kita ketahui perbandingan antara target renstra 2022 dan realisasi yang telah dicapai ditahun 2022. Secara umum, seluruh realisasi telah melebihi target yang ditetapkan. Khusus untuk tujuan kedua dan ketiga, pada saat penetapan renstra awal, tujuan ini tidak menjadi bagian pemenuhan yang harus dilakukan pada level kabupaten/kota. Hal ini kemudian berubah pada tahun 2022, dimana seluruh tujuan diimplementasikan pada level kabupaten. Sebagai acuan, setiap target pada masing-masing indikator dalam tiap sasaran dan tujuan yang bersesuaian, ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPS Kabupaten dan Kepala BPS Provinsi.

Realisasi kinerja yang tinggi dan tercermin pada capaian kinerja setiap indikator, dapat diraih dengan perbaikan sistematika pemenuhan target di BPS Kabupaten Buru Selatan. Sistematika ini berangkat dari setiap kendala yang ditemui secara berulang pada tahun-tahun sebelumnya dan dicarikan solusi pemecahannya. Sehingga, diperoleh langkah-langkah strategis pemenuhan target sebagai berikut:

1. Perubahan metode pelatihan petugas kegiatan sensus dan survei. Sebelumnya, kegiatan *role playing* ditiadakan dalam setiap pelatihan dengan asumsi bahwa setiap calon petugas lapangan dapat memahami konsep definisi yang telah dijelaskan. Namun, berdasarkan hasil kualitas pengumpulan data yang tidak menunjukkan perubahan, maka kegiatan *role playing* dianggap krusial dan dihadirkan dalam setiap sesi pelatihan.
2. Optimalisasi proses pengawasan lapangan oleh pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan dalam setiap kegiatan pengumpulan data.
3. Peningkatan kualitas pemeriksaan data hasil pengolahan yang akan dirilis melalui mekanisme pemeriksaan silang dan berjenjang. Hal ini untuk

menghindari salah tabulasi atau kesalahan lainnya saat data akan dipublikasikan.

4. Koordinasi aktif dengan OPD setempat terkait kepatuhan jadwal pengumpulan data melalui tatap muka dan WAG.
5. Perlu adanya proses sosialisasi ke setiap OPD tentang pentingnya data sektoral dalam pembangunan dan perbaikan miskonsepsi tentang BPS sebagai Pembina data.
6. Pembentukan Tim SAKIP yang solid dan bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokumen-dokumen yang diminta. Selain itu, perlu adanya koordinasi aktif dengan Pembina SAKIP level Provinsi dan BPS RI agar tercipta satu konsep baku terkait dokumen-dokumen yang akan dipenuhi kedepannya.

Strategi - strategi diatas telah dengan maksimal diterapkan pada BPS Kabupaten Buru Selatan ditahun 2022. Hal ini kemudian tercermin pada hasil realisasi yang dapat dikategorikan **baik** jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.

### 3.1.5 Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

Pada subbab ini, akan disajikan tabel perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir renstra pada tahun 2024.

**Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra 2024**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>					
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	98	92	93,88

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	100	100	100
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	n.a	25	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	n.a	50	120
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	n.a	400	120
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>					
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	62	67,19	108,37
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98	100	102,04

Tabel 15 menunjukkan perbandingan antara target akhir renstra tahun 2024 dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2022. Secara umum, realisasi pada tujuan dua sampai dengan tujuan empat telah melampaui target akhir renstra. Khusus untuk realisasi pada indikator 1 sasaran 1 tujuan 1 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan jangka menengah telah dapat dipenuhi oleh seluruh indikator selain indikator Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan dapat dikategorikan **baik**.

### 3.2 Prestasi dan Inovasi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

#### 3.2.1 Prestasi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, BPS Kabupaten Buru Selatan telah mencatatkan sejumlah prestasi. Prestasi ini berkaitan dengan pencapaian kinerja yang baik

dengan kerja keras semua pihak yang terlibat didalamnya. Kumpulan prestasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 16 Daftar Prestasi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

No	Pemberi Penghargaan	Kategori	Peringkat
1	BPS Provinsi Maluku	Pemenuhan Laporan Keuangan Tahunan TA 2021 tercepat dan berkualitas se- Provinsi Maluku	Terbaik Pertama
2	BPS Provinsi Maluku	Kinerja Fungsi Nerwilis Terbaik Semester I Tahun 2022 se-Provinsi Maluku	Terbaik Pertama
3	BPS Provinsi Maluku	Validasi Hasil Long Form SP2020 tercepat se-Provinsi Maluku	Terbaik Ketiga
4	BPS Provinsi Maluku	Kinerja Fungsi Statistik Produksi semester II Tahun 2022	Terbaik Kedua
5	BPS Provinsi Maluku	Kinerja Fungsi Statistik Sosial semester II Tahun 2022	Terbaik Kedua
6	BPS Provinsi Maluku	Kinerja Fungsi Nerwilis semester II Tahun 2022	Terbaik Ketiga
7	BPS Provinsi Maluku	Persiapan Sensus Pertanian 2023	Terbaik Ketiga

Dokumentasi atas prestasi yang diterima dapat dilihat pada lampiran 6.

### 3.2.2 Inovasi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

Inovasi lahir dari keterbatasan. Hal inilah yang dapat menggambarkan kondisi di BPS Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022. Ditengah tahun berjalan, muncul kegiatan baru dengan tingkat kepentingan tinggi yaitu

Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara dimana perlu menciptakan pencatatan transaksi yang lebih akuntabel.

Sebagai respon atas tingginya urgensi ini, BPS Kabupaten Buru Selatan kemudian melakukan inovasi pembayaran, yang sebelumnya terpaku pada pembayaran tunai dan non tunai dengan mekanisme LS, bertambah satu metode baru yaitu pembayaran non tunai dengan mekanisme *Cash Management System* (CMS). Proses transaksi keuangan menggunakan CMS menjadikan transaksi yang lebih akuntabel dan mudah penggunaannya. Hal ini karena BPS Kabupaten Buru Selatan yang sebelumnya harus pergi ke *Teller* bank untuk melakukan penarikan tunai, dapat langsung bertransaksi untuk membayar kebutuhan kepada pihak ketiga/penyedia hanya dengan basis teknologi. CMS memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Uang yang dikelola menggunakan CMS adalah Uang Persediaan yang saldonya masih tersimpan pada rekening *Virtual Account* satuan kerja.

Berikut adalah beberapa *tools* yang digunakan untuk bertransaksi dengan CMS:

Gambar 9. Tampilan Web BNI Direct



Proses transaksi dengan CMS dilakukan berbasis web, dimana untuk BPS Kabupaten Buru Selatan dilakukan pada laman [bnidirect.bni.co.id](https://bnidirect.bni.co.id) Seluruh

pencatatan transaksi pada web ini dapat diunduh setelah transaksi berhasil dilakukan. Dalam proses persetujuan saat uang akan dicairkan/ditransfer, dibutuhkan sebuah alat kecil yang dinamakan Token dengan tampilan seperti pada gambar 10 dibawah ini.

**Gambar 10. Alat Token BNI Direct**



Token berfungsi sebagai alat verifikasi bagi transaksi yang akan dilaksanakan. Jika kode token yang diinput salah, maka transaksi yang akan dilaksanakan tidak berhasil. Kuasa untuk memegang token terletak pada Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja.

### **3.3 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022**

Pada subbab ini, akan dibahas tentang realisasi anggaran BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 jika dilihat berdasarkan program beserta dengan tujuan/sasaran yang akan dicapai. Selain itu, akan dibahas pula efisiensi yang telah dilakukan selama tahun 2022.

#### **3.3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Pagu yang diberikan ke BPS untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.631.584.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan (2) Program

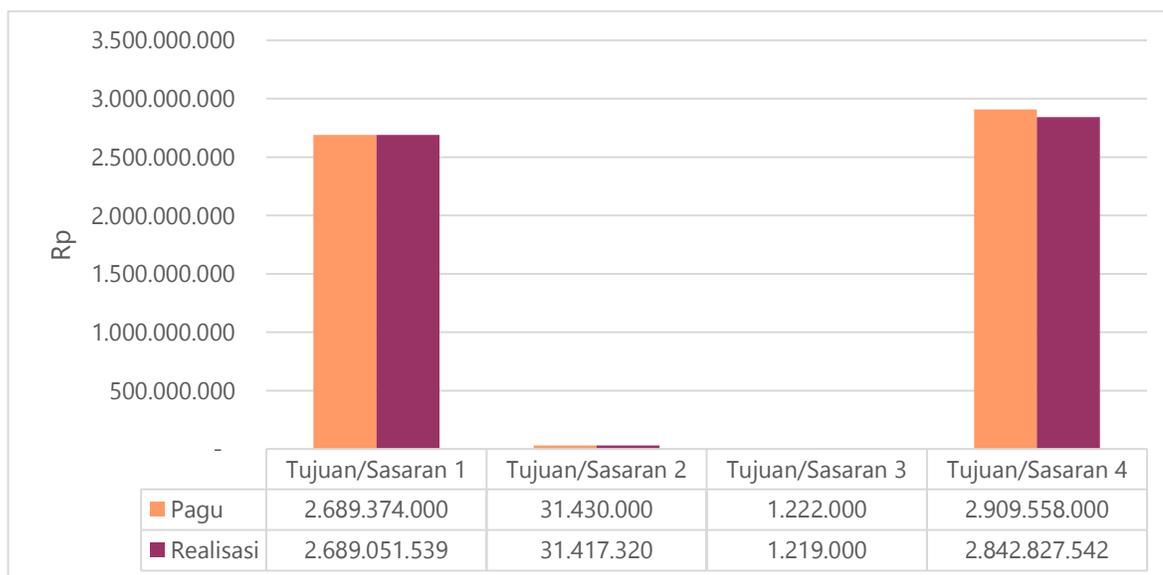
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang masing-masing diberikan anggaran secara berturut-turut Rp2.722.026.000,- dan Rp2.909.558.000,-. Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada Tabel 17 dibawah ini.

**Tabel 17 Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Pada BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

Program	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi(%)	Sisa Anggaran(Rp)
PPIS	2.722.026.000	2.721.687.859	99,99	338.141
Dukman	2.909.558.000	2.842.827.542	97,71	66.730.458
<b>Total</b>	<b>5.631.584.000</b>	<b>5.564.515.401</b>	<b>98,81</b>	<b>67.068.599</b>

Dari tabel diatas, dapat kita lihat realisasi total untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar 98,81 persen. Penyerapan ini dapat dikategorikan efektif untuk dapat menyelenggarakan kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 105,48 persen. Dibawah ini dapat kita lihat gambar perbandingan pagu dan realisasi anggaran untuk setiap tujuan dan sasaran ditahun 2022.

**Gambar 11. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Tujuan/Sasaran Tahun 2022**



Dari gambar diatas, dapat kita ketahui bahwa realisasi dari setiap tujuan telah mencapai diatas 97 persen, terutama realisasi pada tujuan 1 sampai tujuan 3 telah mencapai diatas 99 persen. Hal ini tentu mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 105,48 persen, dimana seluruh anggaran yang ada dioptimalkan untuk pencapaian ini.

### 3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada tabel dibawah ini akan disajikan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2022 menurut program.

**Tabel 18 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Program Pada BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi(%)
PPIS	109,17	99,99
Dukman	101,68	97,71
<b>Total</b>		<b>98,81</b>

Dari tabel ini, dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja untuk kedua program telah melebihi realisasi anggarannya. Artinya, BPS Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 telah **berhasil** melakukan efisiensi anggaran sesuai tujuan **sistem penganggaran berbasis kinerja**.

Perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran juga dapat dilihat berdasarkan tujuan/sasaran yang hendak dicapai ditahun 2022 seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Menurut Tujuan Pada BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

	<b>Tujuan</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi(%)</b>
1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	107,50	99,99
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	100	99,96
3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	120	99,75
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	101,68	97,71
	<b>Total</b>		<b>98,81</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa capaian kinerja seluruh tujuan telah melampaui nilai realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi yang **baik** dari sisi penganggaran untuk pencapaian kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan ditahun 2022. Hal ini juga menjadi pijakan penyelenggaraan sistem penganggaran yang telah berbasis kinerja.

### **3.3.3. Efisiensi Anggaran BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar 98,81 persen (terrealisasi Rp5.564.515.401, dari pagu total Rp5.631.584.000,-). Pagu tersebut berdasarkan anggaran revisi DIPA terakhir yaitu Revisi DIPA Ke-12 (tanggal 27 Desember 2022) dimana sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2022 BPS Kabupaten Buru Selatan telah melaksanakan 15 (lima belas) kali Revisi DIPA, yaitu:

1) Revisi DIPA 1

Pada revisi ini, dilakukan *Automatic Adjustment* (AA) sebesar 5 (lima) persen pada belanja Tunjangan Kinerja dalam rangka Pencadangan Anggaran Tahun sesuai surat Pengguna Anggaran BPS Nomor B-458/01000/PR.440/12/2021, tanggal 8 Desember 2021, perihal Pencadangan Anggaran Tahun 2022. Revisi ini dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran, notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima pada tanggal 15 Desember 2021.

2) Revisi DIPA 2

Pagu semula sebesar Rp4,819,536,000 menjadi Rp5,060,818,000 yang disebabkan adanya penyesuaian dasar hitung PPIS dari BPS Pusat sesuai surat Pengguna Anggaran BPS Nomor B-018/01000/PR.400/01/2022, tanggal 17 Februari 2022, perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Revisi DIPA kedua menyebabkan terjadinya perubahan anggaran, namun hal itu tidak memengaruhi capaian kinerja. Revisi ini dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran, notifikasi dan ADK RKAKL diterima pada tanggal 9 Februari 2022.

3) Revisi DIPA 3

Revisi DIPA ketiga dilakukan pada level Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku. Revisi dilakukan antar Satker untuk Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 pada Satker BPS Provinsi Maluku, BPS Kabupaten Maluku Tengah, BPS Kabupaten Kepulauan Aru, BPS Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pengajuan revisi telah disetujui oleh Sestama BPS RI melalui Surat Sestama BPS Nomor B-125/02000/PR.430/03/2022, tanggal 2 Maret 2022 perihal Tanggapan Permohonan Persetujuan Revisi Antar Satker Provinsi Maluku. Notifikasi dan ADK RKAKL diterima pada tanggal 4 Maret 2022.

4) Revisi DIPA 4

Revisi DIPA dilakukan dalam rangka Penyesuaian Dasar Hitung Dukman dan PPIS dari BPS RI sesuai Surat Sestama BPS Nomor B-258/02000/PR.440/04/2022, tanggal 18 April 2022, perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022. Revisi ini dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran, notifikasi dan ADK RKAKL diterima pada tanggal 27 Mei 2022.

5) Revisi DIPA 5

Sesuai surat Pengguna Anggaran BPS Nomor B-186/01000/PR.440/05/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Penambahan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja TA 2022, dilakukan revisi DIPA kelima. Kegiatan yang wajib dilakukan AA diantaranya pada KRO 2902.BMA.004 (Publikasi/Laporan Statistik Distribusi), 2907.BMA.008 (Publikasi/Laporan Pendataan Podes), 2908.BMA.004 (Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata), dan 2909.BMA.005 (Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang Terbit yang Tepat Waktu).

6) Revisi DIPA 6

Merupakan revisi anggaran yang dilakukan di Kanwil DJPb Provinsi Maluku dalam rangka pemutakhiran halaman III DIPA dan penyesuaian POK. Notifikasi & ADK RKAKL Online diterima tanggal 21 Juli 2022.

7) Revisi DIPA 7

Sesuai Surat Sestama BPS Nomor B-501/02000/PR.440/07/2022, tanggal 22 Juli 2022, perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022, dilakukan penyesuaian terhadap dasar hitung PPIS dalam Revisi DIPA ketujuh pada level DJA. Notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima tanggal 11 Agustus 2022.

8) Revisi DIPA 8

Pada revisi ini dilakukan penyesuaian dasar hitung PPIS untuk mendukung pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Anggaran yang disesuaikan masih dengan status diblokir sembari menunggu Peraturan Presiden tentang Reformasi Perlindungan Sosial. Penyesuaian ini sesuai Surat Sestama BPS Nomor B-585/02000/PR.440/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022, perihal Dasar Hitung Pendataan Awal Regsosek 2022. Notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima tanggal 25 Agustus 2022.

9) Revisi DIPA 9

Pada revisi ini dilakukan penyesuaian dasar hitung PPIS untuk mendukung pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial

Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Anggaran yang disesuaikan masih berstatus diblokir telah dibuka. Hal ini sesuai dengan Surat Sestama BPS Nomor B-602/02100/PR.440/08/2022, tanggal 26 Agustus 2022, perihal Undangan Briefing Persiapan Revisi DIPA Pembukaan Blokir Regsosek 2022. Notifikasi dan ADK RKAKL diterima tanggal 29 Agustus 2022.

10) Revisi DIPA 10

Revisi DIPA kesepuluh merupakan revisi yang dilakukan di Kanwil DJPb Provinsi Maluku secara mandiri. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian POK untuk kegiatan Regsosek 2022 sesuai dengan kebutuhan satker sekaligus Pemutakhiran Halaman III DIPA. Notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima pada 31 Desember 2022.

11) Revisi DIPA 11

Revisi DIPA kesebelas merupakan revisi yang dilakukan di DJA. Revisi dilakukan berkaitan dengan alokasi penambahan anggaran belanja 51 dari BPS sesuai surat B-654/02000/PR.400/09/2022 Tanggal 07 September 2022 tentang Penghitungan kebutuhan Belanja Pegawai dan Potensi Sisa Anggaran Belanja Modal. Notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima pada 20 Oktober 2022.

12) Revisi DIPA 12

Revisi DIPA keduabelas merupakan revisi yang dilakukan di Kanwil DJPb. Revisi ini berkaitan dengan pemutakhiran POK dan penyesuaian halaman III DIPA yang kala itu diberikan

perpanjangan periode. Notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima pada 31 Oktober 2022.

13) Revisi DIPA 13

Revisi DIPA ketigabelas merupakan Revisi Anggaran yang dilakukan di Kanwil DJPb. Revisi ini berkaitan dengan realokasi anggaran 51 dan pengolahan regsosek. Khusus pada pagu Regsosek, BPS Kabupaten Buru Selatan menerima tambahan pagu sebesar Rp15.000.000, dari BPS Kabupaten Maluku Tenggara. Notifikasi ADK dan RKAKL Online diterima pada 17 November 2022.

14) Revisi DIPA 14

Revisi DIPA keempatbelas merupakan revisi anggaran yang dilakukan di DJA. Revisi terkait Realokasi *Automatic Adjustment* sesuai surat B-988/02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Revisi Anggaran dalam rangka Realokasi *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima pada 12 Desember 2022.

15) Revisi DIPA 15

Revisi DIPA kelimabelas merupakan revisi anggaran yang dilakukan pada Kanwil DJPb. Revisi terkait dengan pemutakhiran POK sebagai bentuk implementasi kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2022. Notifikasi dan ADK RKAKL Online diterima pada 27 Desember 2022.

Sampai dengan revisi kelima belas, telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp245.108.000 yang masuk dalam skema *Automatic Adjustment* (AA). Selain itu, bentuk efisiensi lain yang dilakukan BPS Kabupaten Buru Selatan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adalah:

- 1) Integrasi pengumpulan data K-3 dengan pelaksanaan Long Form SP2020. Pengumpulan data K-3 pada tahun 2022 dilakukan dengan mengintegrasikan petugas pencacahnya dengan petugas Long Form SP2020. Hal ini berdampak pada optimalisasi anggaran yang terkonsentrasi hanya pada penggunaan untuk Long Form SP2020 saja.
- 2) Integrasi Pendataan KSA dengan pengawasan lapangan Long Form SP2020. Pada saat pelaksanaan KSA periode Juni dan Juli 2022, dilakukan efisiensi anggaran dengan integrasi pada pengawasan lapangan Long Form SP2020. Dengan daerah pengawasan LF SP2020 dan pendataan KSA yang sama kala itu, efisiensi anggaran yang dilakukan dapat mencapai Rp5.900.000,-

Efisiensi anggaran yang dengan mekanisme AA dan integrasi kegiatan ini tercermin pada nilai efisiensi total saat pemenuhan dokumen FRA Triwulan IV Tahun 2022, dimana BPS Kabupaten Buru Selatan memperoleh nilai efisiensi total sebesar 64,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dengan pagu anggaran yang tersedia, BPS Kabupaten Buru Selatan dapat meraih capaian kinerja sebesar 105,48. Dengan kata lain, implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja pada BPS Kabupaten Buru Selatan berhasil.

### **Upaya Efisiensi Sumber Daya**

Pada tahun 2022, seluruh indikator sumber daya seperti penggunaan listrik, penggunaan mesin dan peralatan kantor mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2021 (Tabel 20). Penggunaan listrik dan telepon yang masuk dalam kelompok belanja jasa serta penggunaan kendaraan dinas, genset kantor, pc, laptop, printer dan gedung kantor yang masuk dalam kelompok belanja

pemeliharaan secara umum mengalami peningkatan sebesar 53,81 persen dibandingkan dengan penggunaannya ditahun 2021. Peningkatan ini tidak menjadi indikator gagalnya efisiensi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan. Namun, sebagai gambaran bahwa aktivitas perkantoran yang berangsur normal setelah adanya kebijakan *work from home* (WFH) pada tahun 2021 akibat pandemi *Covid-19*.

**Tabel 20. Perbandingan Belanja Jasa dan Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Jasa	92.933.857	52.319.148	77,63
Belanja Pemeliharaan	100.043.292	76.970.700	29,98
Jumlah	192.977.149	129.289.848	53,81

Penjelasan peningkatan pada kedua belanja ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Belanja Jasa mengalami peningkatan tajam sebesar 77,63 persen sampai periode 31 Desember 2022. Pada periode Januari-September 2021, tagihan listrik per bulan rata-rata bernilai Rp1,591,920. Namun sejak Oktober 2021, terjadi peningkatan besaran tagihan listrik hingga 2 (dua) kali lipat. Peningkatan ini konsisten terjadi hingga Juni 2022. Bahkan, pada bulan Desember 2022 jumlah tagihan listrik mencapai sekitar Rp6,048,191. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis PT. PLN, diketahui bahwa pada periode Januari-September 2021, terjadi anomali pada instalasi listrik kantor BPS Kabupaten Buru Selatan, sehingga besaran tagihan listrik dibiarkan *flat* (tetap). Selain peningkatan pada tagihan listrik, kontribusi lain datang dari pembiayaan rapid tes antigen. Pelaksanaan rapid tes antigen di BPS Kabupaten Buru

Selatan merupakan syarat terselenggaranya kegiatan pelatihan petugas dan perjalanan dinas pegawai, juga sebagai tindakan preventif penyebaran *Covid-19* varian *Omicron* yang sempat menginfeksi beberapa pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan pada awal tahun 2022.

- 2) Belanja pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar 29,98 persen dibanding tahun 2021. Penggunaan fasilitas perkantoran seperti kendaraan dinas yang meningkat berbanding lurus dengan perawatan yang dibutuhkan. Selain itu, pada awal tahun dan pertengahan tahun 2022 kemarin, terdapat pemeliharaan gedung kantor seperti penggantian lis plafon, perbaikan atap kantor yang bocor, penggantian plafon yang rusak dan pengecatan dinding-dinding kantor. Pemeliharaan dengan skala yang lebih besar dibanding tahun 2021 turut berdampak pada peningkatan belanja pemeliharaan.

Efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Buru Selatan untuk tahun 2022 kepada setiap individu berupa kesadaran perilaku dalam penggunaan fasilitas kantor. Seperti, mematikan lampu dan pendingin ruangan ketika akan meninggalkan kantor, menggunakan kendaraan dinas hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan tugas dinas dan tidak menggunakan PC kantor untuk kepentingan pribadi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2022 yang bersinergi dengan rencanarencana kerja baik secara vertikal dan horizontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan rencana kerja Badan Pusat Statistik. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara rencana kerja dengan fungsi dan beserta penganggarannya.

Rencana kerja disusun untuk menjaga agar arah kebijakan, program, tujuan dan sasaran menjadi terfokus, sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan monitoring serta evaluasinya. Pada tahun 2022 seluruh kebijakan, program, dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya sebagian besar juga telah berhasil dicapai. BPS Kabupaten Buru Selatan telah meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik berkualitas yang tercermin dari capaian indikator kinerja yang keseluruhan indikatornya dapat disimpulkan baik.

Dalam rangka terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih, telah dilakukan perbaikan guna meningkatkan nilai SAKIP. Perbaikan melalui sosialisasi, internalisasi dan peningkatan kompetensi tim pengelola data SAKIP. Wujud nyata ini tercermin dengan peningkatan nilai SAKIP yang signifikan ditahun 2022.

#### 4.2 Rencana tindak lanjut

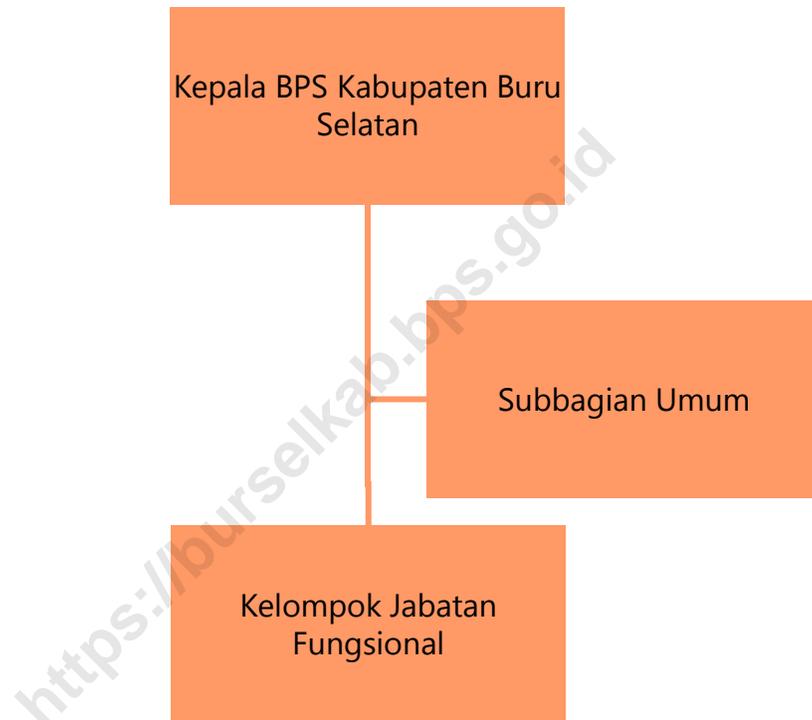
Terhadap segala kendala yang ditemui dalam proses pencapaian target setiap tujuan, BPS Kabupaten Buru Selatan berupaya untuk dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Perubahan metode pelatihan bagi petugas kegiatan sensus dan survei yang baru. Sebelumnya, kegiatan *role playing* ditiadakan dalam setiap pelatihan dengan asumsi bahwa setiap calon petugas lapangan dapat memahami konsep definisi yang telah dijelaskan. Namun, berdasarkan hasil kualitas pengumpulan data yang tidak menunjukkan perubahan, maka kegiatan *role playing* dianggap krusial dan dihadirkan dalam setiap sesi pelatihan.
- 2) Pengawasan lapangan oleh pegawai BPS Kabupaten Buru Selatan perlu dioptimalisasi dalam setiap kegiatan pengumpulan data.
- 3) Kualitas data hasil pengolahan yang akan dirilis harus dijaga ketat melalui mekanisme pemeriksaan silang dan berjenjang. Hal ini untuk menghindari salah penempatan tabulasi atau kesalahan lainnya saat data akan dipublikasikan.
- 4) Aktif berkoordinasi dengan OPD setempat terkait kepatuhan jadwal pengumpulan data melalui tatap muka dan WAG.
- 5) Proses sosialisasi ke setiap OPD tentang pentingnya data sektoral dalam pembangunan dan perbaikan miskonsepsi tentang BPS sebagai Pembina data harus dilakukan secara terjadwal.
- 6) Pembentukan Tim SAKIP yang solid dan bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokumen-dokumen yang diminta. Selain itu, perlu adanya koordinasi aktif dengan Pembina SAKIP level Provinsi dan BPS RI agar tercipta satu konsep baku terkait dokumen-dokumen yang akan dipenuhi kedepannya.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN BURU SELATAN



Lampiran 2.

Renstra BPS Kabupaten Buru Selatan 2020 – 2024 (Reviu Terakhir 2021)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>							
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	70	89	92	95	98
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	100	33,33	66,66	100	100
<b>Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>							
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	0	0	0	0	0
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	0	0	0	0	0
<b>Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>							
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	0	0	0	0	0
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>							

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	57,2	57	59,1	60	62
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98	95	96	97	98

<https://burselkab.bps.go.id>

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	92
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	90
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	25
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	90
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>					
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen			
			92	92	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen			
90			100	111,11	
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen			
			25	25	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen			
50			50	100	
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>					

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen			
			100	100	100
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>					
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin			
			65	67,19	103,37
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen			
			100	100	100

Lampiran 5

**Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022**

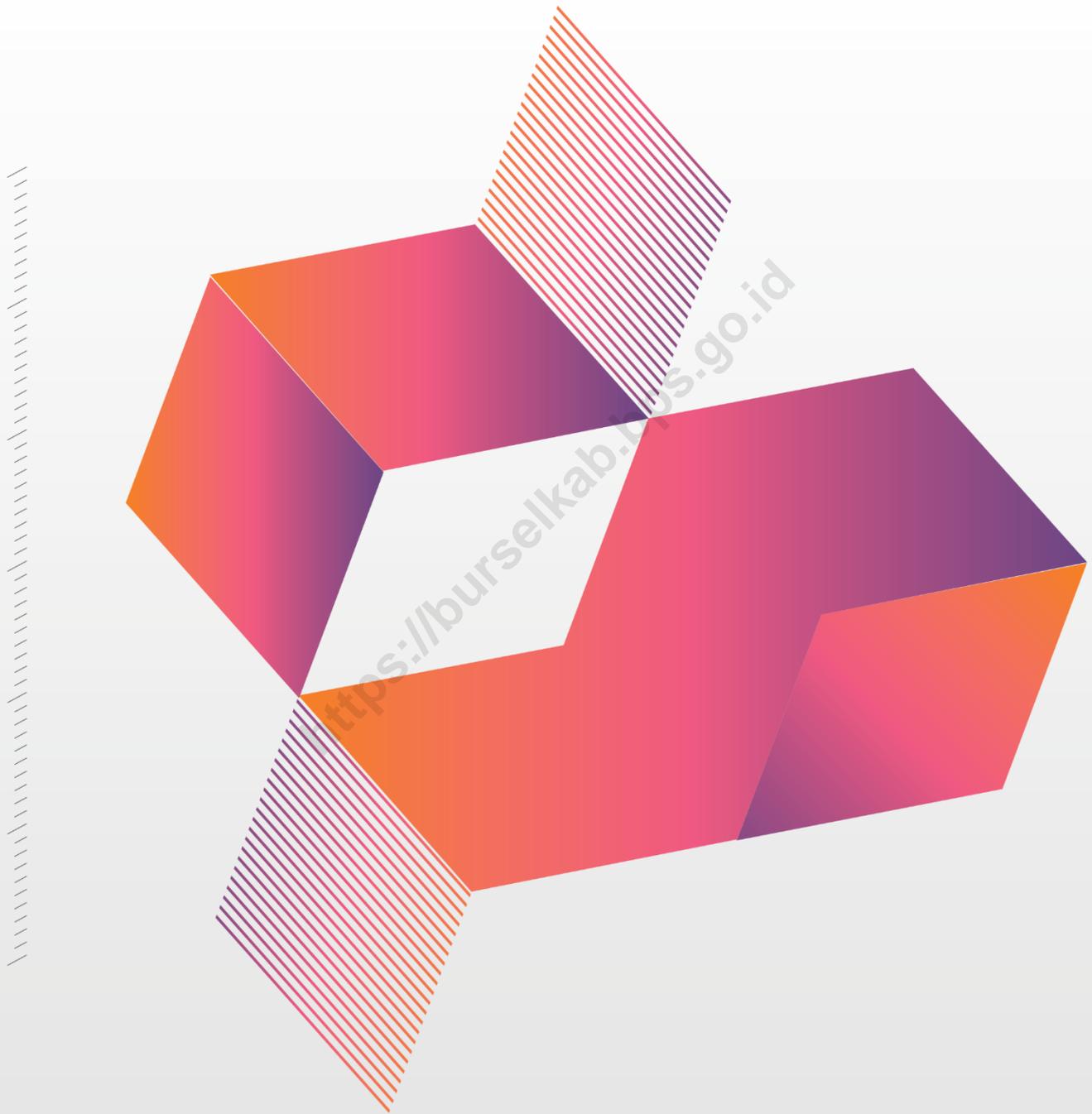
No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan			
		SLTA	DIII	DIV/S1	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala BPS Kab. Buru Selatan	-	-	1	<b>1</b>
2	Subbagian Umum	-	-	1	<b>1</b>
3	Fungsional Statistisi	-	1	8	<b>9</b>
4	Fungsional Pranata Komputer	-	-	2	<b>2</b>
5	Fungsional Pranata APBN	-	-	1	<b>1</b>
6	Koordinator Statistik Kecamatan	2	-	-	<b>2</b>
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>16</b>

Lampiran 6

Dokumentasi Prestasi BPS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022







**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BURU SELATAN**

**JL. REHEN SAP RAJA FOGI, KAMLANGLALE NAMROLE, BURU SELATAN**

**TELP. (0913) 2324860 | E-MAIL: [bps8109@bps.go.id](mailto:bps8109@bps.go.id)**

**HOME PAGE: [burselkab.bps.go.id](https://burselkab.bps.go.id)**